BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendahuluan

Organisasi pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai bentuk organisasi publik. Kondisi ini akan semakin memperkuat tuntutan akuntabilitas kepada organisasi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam Pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Mardiasmo, 2021: 1).

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD) (Djanegara, 2017: 1). Menurut Anwar (2021:3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan

manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan, dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam pengambilan keputusan (Anwar, 2021: 2).

Kriteria dan unsur-unsur yang membentuk kualitas informasi yang digunakan sebagai informasi dalam laporan keuangan pemerintah memiliki nilai atau manfaat tertentu yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bagian Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, terdiri dari:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami.

Tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu ditingkatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam stuktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan proses

tersebut dilaksanakan oleh bagian keuangan berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara (Nordiawan & Hertianti, 2010: 202).

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas,badan dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengguna anggaran yang dikelolanya. Sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang. (Djanegara, 2017:13).

Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 207). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus berpedoman pada prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan pemerintah tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR/DPRD kemudian kepada masyarakat umum dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kompetensi sumber daya manusia. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasioanal Indonesia (SKKNI) menyatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Namun dilapangan terjadi fenomena mengenai kompetensi SDM. Zainal, M (2020, Mei 8), dalam lingkup organisasi pemerintah, SDM kadang kala tidak menjadi titik fokus perhatian utama. Akibatnya berimbas pada kinerja organisasi pemerintah sehingga sulit menjadi organisasi inovatif, berdaya saing yang tinggi dan mutu pelayanan yang tidak prima. Realitas tersebut kemudian menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan manajemen pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kendala yang dihadapi seperti penialaian kerja, pengangkatan dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensi, sistem pendidikan dan pelatihan. Kondisi ini menunjukan bahwa tiga aspek pokok dalam pengembangan SDM aparatur masih perlu di kembangkan seperti peningkatan keterampilan, keahlian dan sikap pegawai. Kecenderungan pemerintah daerah memiliki kelemahan seperti bekerja bukan pada bidang keahliannya. Hal ini berdampak pada lemahnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tersebut menjadi alasan pokok pentingnya pengembangan SDM berbasis kompetensi.

Dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia inilah maka mampu mendukung jalannya sumber daya yang lain. Kesuksesan sebuah organisasi sangat bergantung pada kinerja dan kompetensi manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan akan sangat membutuhkan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Yusup, 2021: 2).

Pengendalian internal merupakan bagian dari sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional organisasi pemerintah , penggunaan sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem (Latifah, 2021: 2). Pengendalian intern yang dirumuskan oleh COSO, diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memberikan pengertian bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif fan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu kriteria pemberian opini yang diberikan oleh BPK. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) 1 tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPK menyatakan pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam Redaksi (2020, Agustus 21), Inspektorat Kota Tasikmalaya mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Tasikmalaya. H.Tarlan mengatakan, sosialisasi SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai kepada seluruh OPD bahwa SPIP adalah organisasi yang baik, sebagai pedoman dimana para

pemimpin OPD di Kota Tasikmalaya bisa memanajemen organisasinya dengan baik. menurutnya, SPIP salah satu indikator kineja utama bagi setiap pegawai dan OPD. Tolak ukur SPIP, apabila sistem mewujudkan pengendalian yang bagus maka akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. para pelaksana pegawai dan pimpinan OPD harus berpedoman pada SPIP yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Sementara itu, dikatakan oleh Plt. Walikota Tasikmalaya, M.Yusuf, "Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan".

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh BPK-RI bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang diperiksa tersebut. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Suatu laporan keuangan pemerintah dinyatakan baik jika memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK-RI (Nasution & Debora, 2019: 2).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengungkapkan Opini Wajar Pengetahun (WTP) atas 485 (90%) LKPD, Opini Wajar Dengan Pengecualiasn (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD Seperti Terlihat dalam Gambar 1.1.

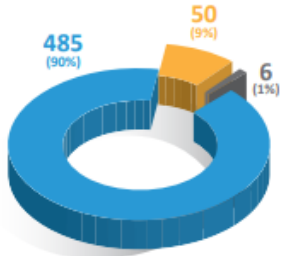

Gambar 1. 1

Opini LKPD Tahun 2019

Sumber: IHPS 1 Tahun 2020, www.bpk.co.id.

Perkembangan opini LKPD Tahun 2015-2019 tingkat Pemda,dapat dilihat pada Gambar 1.2.

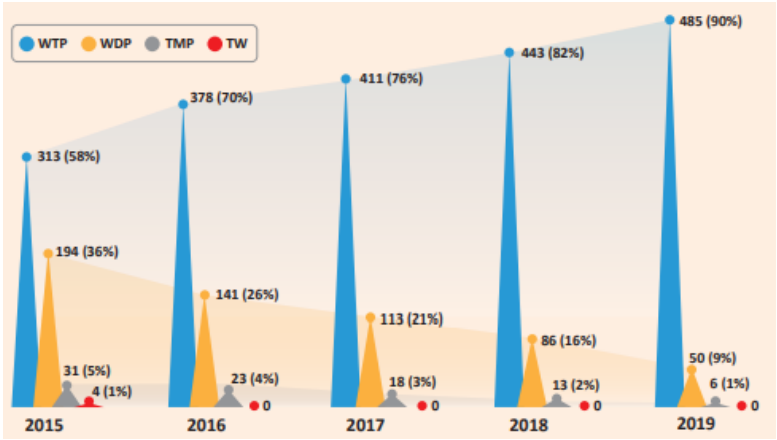

Gambar 1. 2

Perkembangan Opini LKPD tahun 2015-2019

Sumber: IHPS 1 Tahun 2020, www.bpk.co.id

Berdasarkanan Gambar 1.2, dalam 5 tahun terakhir (2015-2019), opini LKPD mengalami perbaikan. Kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan yang ditunjukan dengan kenaikan opini WTP sebesar 8 poin persen yaitu 82% pada tahun 2018 menjadi 90% pada tahun 2019. Pada LKPD Tahun 2018, sebanyak 443 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (82%), sedangkan pada LKPD Tahun 2019

sebanyak 485 dari 541 LKPD yang memperoleh opini WTP (90%). (IHPS 1 Tahun 2021, www.bpk.go.id).

Namun dilapangan terjadi fenomena mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Saepulloh, A. (2021, Mei 24), Kota Tasikmalaya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Opini WTP tersebut mampu dipertahankan Kota Tasikmalaya selama lima kali berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Plt Kota Tasikmalaya H.Muhammad Yusuf usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2020 yang diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib SE, MSI di aula Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar, Kamis, 20 Mei 2021. Yusuf mengatakan bahwa raihan opini WTP tidak terlepas dari ketaatan Pemkot Tasikmalaya dalam penggunaan anggaran keuangan daerah sesuai aturan ketentuan dan akhirnya memperoleh opini WTP. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama pada OPD yang ada di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Dijelaskan Yusuf, laporan keuangan yang baik tentu saja akan menjadi sumber informasi startegis bagi setiap pengambilan keputusan pemerintah.

Berikut merupakan Opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya selama lima tahun:

Tabel 1. 1

Daftar Opini untuk LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Tahun	Opini
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : LHP LKPD Kota Tasikmalaya 2016-2020, IHPS www.jabarbpk.go.id

Tabel 1.1 menunjukan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Tasikmalaya pada tahun 2016-2020. Kota Tasikmalaya meraih dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang baik tentu saja akan menjadi sumber informasi strategis bagi setiap pengambilan keputusan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Abdul Hakim (2016) dengan judul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil Penelitian tersebut Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik Kompetensi Sumber Daya

Manusia, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya , semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dijalankan oleh SKPD, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Lilis Wijayanti (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknonogi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian tersebut Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Putri Wulandarai, Kennedy dan Enni Savitri (2014) dengan judul Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal, dan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Hasil penelitian tersebut kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan,karena adanya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan. Dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan, karena adanya pemisahan tugas saat pelaksanaan APBD agar setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.

4. Raja Yoga Gustika Armel (2017) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Dumai. Hasil penelitian tersebut kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina (2016) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian tersebut Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD dan penerapan SPIP berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian pengaruh tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Ini membuktikan bahwa SPIP merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas LKPD, kuat lemahnya sistem pengendalian intern yang didukung oleh kompetensi SDM menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan.
6. Ni Made, I Gusti dan Budiasih. (2015) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan PemKab Tabanan melalui

penerapan SPIP dan SAP, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan PemKab Tabanan.

7. Reno Julia Utama (2017) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian tersebut kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhdap kualitas laporan keuangan.
8. Warih Komasarasari (2016) dengan judul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhdap keterandalan pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bantul. Hasil penelitian tersebutvariabel kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhdap keterandalan pelaporan keuangan dan variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhdap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerha.
9. Ida Ayu dan Ni Made (2016) dengan judul pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD kabupaten Badung. Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhdap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel sumber daya manusia dan sistem

pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhdap kualitas laporan keuangan.

10. Elmida Ihsanti (2014) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhdap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Semakin berkompeten SDM yang ada maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
11. Ratna Wijayanti (2017) dengan judul pengaruh kompetensi SDM dan implementasi akuntansi akrual terhdap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun. Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Madiun, hal ini terjadi karena masih banyak karyawan di bidang keuangan di SKPD yang tidak memiliki latar belakang, pendidilan akuntansi.
12. Fidyah Yuli Ernawati dan Rokhman Budiyono (2019) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan tehnologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah sakit umum di Kabupaten Blora. Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

13. Tuti Herawati (2017) dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan survei pada organisasi perangkat daerah Pemda Cianjur. Hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan.
14. Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011) dengan judul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah studi pada SKPD Kabupaten Kampar. Hasil penelitian variabel pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.
15. Khoirina Kencana Ningrum (2018) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
16. Noprial Valenra Maksyur (2013) dengan judul pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi,sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhdap kualitas laporan keuangan studi empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian bahwa sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

17. Freddie Lasmara dan Sri Rahayu (2016) dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya apabila kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada seluruh SKPD di Kabupaten Kerinci dilaksanakan dengan baik mka akan menunjang pencapaian kualitas laporan keuangan.
18. Putriasri Pujanira (2017) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DIY. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
19. Irmawanti, Syaikhul dan Pangayow (2019) dengan judul pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pengunungan Bintang.

20. Siska Marini, David Paul dan Hendrik Gamai (2018) dengan judul Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Kotamobagu.

Tabel 1. 2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama,Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Abdul Hakim (2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerpan Sitem Akuntansi keuangan Daerah (SAKD) dan sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu).	• Kompetensi sumber daya manusia • Sistem pengendalian Intern • Kualitas Laporan Keuangan • Data Primer • Teknik *Purposive Sampling* • Teknik pengumpulan data : kuesioner	• Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) • Menggunakan Metode analisis regresi berganda	Kompetensi sumber daya manusiaberpengaruh dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Volume 4 No.1 (Februari) 2017. ISSN : 2355-6854.
2.	Lilis Wijayanti (2017) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan	• Kompetensi Sumber Daya Manusia	• Teknologi Informasi • Metode penelitian:	Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh	Artikel ilmiah akuntansi. Fakultas

	Teknologi Informasi Terhdap Kualitas Lporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo.	• Kualitas Laporan Keuangan • Teknik pengumpula n data: kuesioner	Sampel jenuh • Hasil penelitian kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD	terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhdap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Ekonomi dan bisnis Universitas Muhamma diyah Surakarta.
3.	Putri Wulandari, Kennedy dan Enni Savitri (2014) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal dan teknologi informasi terhdap keandalan laporan keuangan (Pada SKPD Provinsi Riau)	• Pengendalia n Internal • Teknik pengumpula n data : Kuesioner	• Kualitas sumber daya manusia • Teknologi informasi • Keandalan laporan keuangan • Metode analisis regresi linear berganda	Kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan, karena adanya pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalm tugas. Dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan lporan keuangan karena adanya pemisahan tugas saat pelaksanaan APBD.	JOM Fekon. Volume 1. No.2 Oktober 2014. *Fakulty Of Economic Riau University*.
4.	Raja Yoga Gustika Armel (2017) Pengaruh sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem	• Sumber daya manusia • Sistem pengendalia n internal • Kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpula	• Pemanfaatan teknologi informasi • Metode analisis regresi linear berganda	Kompetensi Sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 4. ISSN : 2355-6854.

	pengendalian internal terhdap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (pada SKPD Kota Dumai).	n data : kuesioner			
5.	Sagung Inten Evicahyani dan Nyoamn Djinar Setiawina (2016) analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Tabanan.	• Kualitas Laporan Keuangan • Jenis data primer • Teknik pengumpula n data : kuesioner	• Faktor-faktor yang mempengaru hi	Kompetensi Sumber daya manusia dan penerapan sistm pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhdap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol.3. ISSN : 2337-3067.
6.	Ni Made., I Gusti dan Budiasih (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (pada PPK-SKPD Kabupaten Tabanan).	• Kompetensi Sumber Daya Manusia • Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah • Kualitas Laporan keuangan • Teknik *Purposive Sampling*	• Standar Akuntansi Pemerintah	Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan PemKab Tabanan melalui penerapan SPIP dan SA, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan PemKab Tabanan.	E-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali. Vol.4. ISBN : 139166103 6
7.	Reno Julia Utama (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,	• Kompetensi Sumber Daya Manusia • Sistem Pengendalia n Intern • Kualitas	• Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi sumber daya manusia dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif kualitas	JOM Fekon, Volume 4,No.1. *Faculty Of Economic Riau University*.

	penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	Laporan Keuangan • Teknik pengumpulan data : Kuesioner		laporan keuangan.	
8.	Warih Komasari (2016) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhdap Keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul).	• Sumber Daya Manusia • Sistem Pengendalian Intern • Menggunakan Teknik sampling : *Purposive Sampling*	• Pemanfaatan Teknologi Informasi • Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah • Menggunakan metode analisis regresi linear berganda	Variabel kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan dan variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhdap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Volume 2. ISSN : 0037-5675.
9.	Ida Ayu dan Ni Made (2016) Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (di SKPD Kabupaten Badung).	• Sumber daya manusia • Sistem Pengendalian Intern • Kualitas Laporan Keuangan • Metode pengumpulan data : Kuesioner	• Pemahaman Basis Akrual • Metode Analisis Regresi linear berganda	Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhdap kualitas laporan keuangan daerah.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 16. No.2. Agustus (2016). ISSN : 1290-1318
10.	Emilda Ihsanti (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya	• Kompetensi sumber daya manusia • Kualitas	• Penerapan sistem akuntansi keuangan	Kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian	E.Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi

	Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualits Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).	laporan keuangan • Teknik pengumpulan data : Kuesioner	daerah • Metode analisis regresi berganda	hipoteisis mempunyai pengaruh signifikan positif terhdap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota.	Universitas Negeri Padang. ISBN: 9783540773405
11.	Ratna Wijayanti (2017) Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun).	• Kompetensi sumber daya manusia • Kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data : Kuesioner • Data primer	• Implementasi akuntansi akrual • Hasil penelitian kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangn	Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadao kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 6, Nomor 3, Maret 2017. ISSN : 2460-0585.
12.	Fidyah Yuli Ernawati dan Rokhman Budiyono (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Umum di Kabupaten Blora).	• Kompetensi sumber daya manusia • Sistem pengendalian intern • Kualitas laporan keuangan	• Pemanfaatan tehlonolgi informasi • Menggunakan teknik sampling jenuh • Metode analisis regresi berganda	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhdap variabel kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ekonomi Manajemen. Volume 1 No.2. Februari 2019. ISSN Online 2623-2278
13.	Tuti Herawati (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	• Sistem Pengendalian Intern • Kualitas Laporan Keuangan	• Tidak ada variabel independen Kompetensi sumber daya manusia	Sistem Pengendalian Intern terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas	Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing

	(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	• Teknik *Purposive Sampling* • Metode *Path analysis*		laporan keuangan secara parsial dan simultan.	dan Perpajakan). Volume 11, No.1-2014. ISSN : 1693-4482.
14.	Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabuoaten Kampar).	• Sistem Pengendalian Internal • Metode deskriptif dengan pendekatan survey • Teknik pengumpulan data : kuesioner	• Pemanfaatam Teknologi Informasi • Kinerja Instansi Pemerintah • Metode analisis regresi linear berganda	Variabel pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah	Jurnal Ekonomi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Volume 19. ISSN : 0853-7593.
15.	Khoirina Kencana Ningrum (2018) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Kebumen.	• Pengaruh kompetensi sumber daya manusia • Sistem pengendalian intern • Kualitas laporan keuangan • Teknik *Purposive Sampling*	• Pemanfaatan teknologi informasi • Hasil penelitian kompetensi SDM tidak berpengaruh secara siginikan terhadap kualitas laporan keuangan	Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
16.	Noprial Valenra Maksyur (2013) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komintemen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Tekonologi Informasi Terhadap	• Sumber daya manusia • Sistem pengendalian intern • Kualitas laporan keuangan • Teknik *Purposive Sampling*	• Pemanfaatan teknologi • Metode analisis regresi berganda	Sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpe garuh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.	JOM FEKON. Volume 2, No.2 Oktober 2015. ISSN: 1098-6596. *Faculty of Economics Riau*

	Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu).	• Teknik pengumpulan data : Kuesioner			*University*.
17	Freddie Lasmara dan Sri Rahayu (2016) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabaputen Kerinci.	• Kompetensi sumber daya manusia • Kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data : kuesioner	• Perangkat pendukung • Peran auditor • Metode analisis regresi linear berganda	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Volume 3, No.4, April-Juni 2016. ISSN: 2355-8520.
18	Putriasri Pujanira (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.	• Kompetensi sumber daya manusia • Kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data : kuesioner	• Penerapan standar akuntansi pemerintah • Penerpan sistem akuntansi keuangan daerah • Metode analisis regresi linear berganda	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Nomina, Barometer riset akuntansi dan manajemen. Volume 6, No.2. ISSN: 2303-2065.
19.	Irmawanti, Syaikhul dan Pangayow (2019) Pengaruh Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan	• Kompetensi sumber daya manusia • Kualitas laporan keuangan	• Akuntansi pemerintah daerah • Pemanfaatan teknologi informasi	Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.	Jurnal Akuntansi, Audit & Aset. Volume 2, No.1, mei 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

	Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.				
20.	Siska Marini, Dvid Paul dan Hendrik Gamai (2018) Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknonlogi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Kotamobagu.	• Kompetensi sumber daya manusia • Sistem pengendalian intern • Kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data : kuesioner	• Penerapan standar akuntansi pemerintah • Pemanfaatan teknologi informasi • Metode analisis regresi linear berganda	Sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Kota Kotamobagu.	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" . Volume 9, No.2. ISSN: 2715-1859.
Intan Hendrawati (2022) 183403118 **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada SKPD Kota Tasikmalaya)**					

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitain yang berjudul **" Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan (Survey Pada SKPD Kota Tasikmalaya)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah

terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan agar dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan praktek.

2. Bagi pihak SKPD di Kota Tasikmalaya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Pihak lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi bagi paraktik akuntansi di masa yang akan datang dalam hal tersedianya bukti empiris tentang faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

SKPD dan sebagai bahan referensi serta bacaan untuk melakukan penelitian selanjutnya, memperluas jaringan dan tambahan informasi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis akan melaksanakan penelitian ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan oktober sampai dengan bulan bulan Mei 2022. Adapun waktu penelitian terlampir pada lampiran 1.